

BAB. V

KESIMPULAN DAN SARAN

1.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan pada BAB IV maka didapatkan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Indikator Kinerja Utama pada Pemerintah Kota Padang telah mengikuti dengan aturan yang berlaku yaitu Permendagri nomor 54 tahun 2010, Permen PAN Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 pasal 3 dan pasal 4, dan Permen PAN Nomor PER/20/M.PAN/11/2008. Namun menurut Permen PAN Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 pasal 5, Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Padang dari 3 (tiga) SKPD yaitu Dinas Perindagtamben, Dinas Pasar dan Dinas Koperasi UMKM belum semua yang berorientasi pada *outcome*. Terdapat 5 (lima) Indikator Kinerja Utama yang berorientasi pada *output*, 7 (tujuh) berorientasi pada *outcome* (hasil) dari 12 (duabelas) Indikator Kinerja Utama yang diteliti.
2. Menggunakan pendekatan Alur Logika Program untuk menganalisis 12 (duabelas) Indikator Kinerja Utama dari 3 SKPD yaitu Dinas Perindagtamben, Dinas Pasar dan Dinas Koperasi UMKM terdapat 5(lima) tidak berorientasi pada *outcome*, 7 (tujuh) yang berorientasi pada *outcome*.
3. Menggunakan pendekatan Vincent Gaspersz's *Worksheet* untuk menganalisis 12 (duabelas) Indikator Kinerja Utama dari 3 SKPD yaitu Dinas Perindagtamben, Dinas Pasar dan Dinas Koperasi UMKM, 7 (tujuh) IKU yang memenuhi semua kriteria dari Vincent Gaspersz. Sehingga ada 5 (lima) Indikator Kinerja tersebut belum tepat dijadikan Indikator Kinerja Utama pada Pemerintah Kota Padang.

4. Terdapat konsistensi penggunaan Indikator Kinerja Utama pada dokumen perencanaan daerah, Perjanjian Kinerja dan dokumen pelaporan (LAKIP) Pemerintah Kota Padang.

1.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian, maka peneliti menyarankan kepada Pemerintah Kota Padang untuk :

1. Menyusun Indikator Kinerja sesuai dengan peraturan terkait agar memenuhi kriteria sebagai Indikator Kinerja Utama.
2. Menyempurnakan kualitas ukuran keberhasilan pada RPJMD menjadi lebih berorientasi pada hasil, relevan, terukur, dan cukup untuk mengukur kondisi jangka menengah dan setiap tahunnya.
3. Meningkatkan Kualitas Renstra SKPD melalui penyempurnaan tujuan dan sasaran agar lebih berorientasi pada hasil, serta ukuran keberhasilan agar dapat mengukur keduanya.
4. Menggunakan Alur logika program untuk menguji Indikator Kinerja, yang dapat mengarahkan Indikator Kinerja Utama berorientasi pada *outcome*.
5. Ada 2 (dua) Indikator Kinerja Utama yang bisa digabung karena mempunyai sasaran dan tujuan yang sama.
6. Menggunakan Vincent Gaspersz's *Worksheet* untuk menentukan Indikator Kinerja Utama yang tepat sebagai Indikator Kinerja Utama.
7. Dalam penyusunan IKU menggunakan terapan *Partisipative leadership*, setiap tingkatan mempunyai peran dan memberikan kontribusi kinerja kepada pimpinan level atasnya sehingga IKU yang berguna untuk mengukur kinerja Pemerintah dapat berjalan dengan baik. Penyusunan IKU harus dilakukan mulai dari tingkatan yang paling bawah (staf/eselon IV) sampai dengan Kepala Daerah dan DPRD. Selanjutnya Kepala SKPD berkewajiban untuk meneruskan kontrak kinerja dengan membagi kinerja tersebut ke masing-masing level pimpinan.

1.3 Implikasi

1. Sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya mengenai Indikator Kinerja Utama pada Instansi Pemerintah.
2. Penelitian ini bisa menjadi bahan pertimbangan, masukan dan informasi berguna bagi Pemerintah Kota Padang, yang diawali tahap perencanaan, pengendalian dan evaluasi. Hal ini sangat penting dalam penetapan Indikator Kinerja Utama pada Pemko Padang agar kinerja pemerintah bisa diukur dengan baik dan kunci keberhasilan dari pelaksanaan pembangunan di Pemerintah Daerah ketika dapat menetapkan IKU dengan tepat sesuai aturan yang berlaku dan adanya konsistensi antara Perencanaan, pengendalian dan penganggaran.

